

Penataan Kawasan Wisata Pesisir Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Makassar

Structuring Coastal Tourism Areas in Support of Micro, Small and Medium Enterprises in Makassar City

Naliya Marshandie¹, Batara Surya², Syafri³, Nur Okviyani⁴

¹ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa, Makassar

² Program Studi Doktorat Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa, Makassar

³ Program Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa, Makassar

⁴ Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Barat, Majene

naliyamarshandie@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima; 24-03-2025

Direvisi; 29-03-2025

Disetujui; 30-03-2025

Abstract. *This research aims to organize the Blue Beach coastal tourism area in Makassar City to support Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). A qualitative research approach is needed in this research to determine a clear concept of spatial planning and attention from the community and government to make Pantai Biru an organized, beautiful, and comfortable tourist destination. The results of this study explain that it is necessary to improve suggestions and land arrangements in coastal tourism areas, especially the arrangement of the location of MSME support facilities around coastal tourism areas, then improve infrastructure and accessibility to the tourism area.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menata kawasan wisata pesisir Pantai Biru di Kota Makassar guna mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan penelitian kualitatif sangat diperlukan pada penelitian ini untuk menentukan konsep penataan ruang yang jelas serta perhatian dari masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan Pantai Biru sebagai destinasi wisata yang teratur, indah, dan nyaman. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlunya peningkatan sarana dan penataan lahan di kawasan pariwisata pesisir, khususnya penataan lokasi sarana pendukung UMKM di sekitar kawasan pariwisata pesisir, selanjutnya peningkatan prasarana dan aksesibilitas pada kawasan pariwisata.

Keywords:

Wilayah pesisir;

Pariwisata; UMKM;

Potensi sumber

daya ;penataan ruang;

pantai biru;.

Corresponden author:

Email: naliyamarshandie@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

1. PENDAHULUAN

Pesisir merupakan wilayah yang dinamis sekaligus rentan terhadap tekanan ekologis dan sosial. Kedinamisan wilayah ini disebabkan oleh pertemuan dua ekosistem besar—ekosistem daratan dan laut—yang menjadikan pesisir sebagai zona dengan keragaman ekologi dan ekonomi yang tinggi. Potensi sumber daya hayati dan

nonhayati, termasuk jasa ekosistem pesisir seperti wisata, perikanan, dan perlindungan pantai, menjadikan wilayah ini sangat strategis bagi pembangunan berkelanjutan (Barragán & de Andrés, 2019). Namun, kompleksitas interaksi manusia dengan lingkungan pesisir menyebabkan tingginya risiko degradasi lingkungan, konflik pemanfaatan lahan, dan tekanan terhadap ekosistem yang sensitif.

Di era globalisasi saat ini, sektor pariwisata pesisir berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis. Pariwisata telah diakui sebagai motor penggerak ekonomi global dan lokal, khususnya di negara-negara berkembang, di mana kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja sangat signifikan (UNWTO, 2022). Selain itu, kawasan wisata pesisir memberikan peluang besar bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, baik dalam bentuk penyediaan jasa, kuliner, transportasi, hingga kerajinan lokal. Namun, potensi ini belum tergarap maksimal di banyak wilayah, termasuk di Kota Makassar.

Kota Makassar memiliki berbagai kawasan wisata pesisir yang potensial, salah satunya adalah Pantai Biru di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Kawasan ini memiliki daya tarik alami dan kedekatan geografis dengan pusat kota. Namun, hingga kini kawasan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang optimal. Pantai Biru masih menghadapi tantangan dalam hal penataan ruang, kurangnya infrastruktur dasar dan fasilitas wisata, rendahnya kualitas layanan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Fragmentasi pengelolaan antar pelaku juga memperburuk koordinasi pembangunan. Penelitian oleh Aflaha et al. (2020) menunjukkan bahwa kurangnya integrasi antara tata ruang dan pengembangan kawasan wisata menyebabkan rendahnya kualitas destinasi serta daya saing ekonomi lokal.

Lebih lanjut, studi oleh Trisnawati et al. (2021) menegaskan bahwa pelibatan UMKM dalam pembangunan pariwisata harus diiringi dengan penataan ruang yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata pesisir terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan, daya tarik wisata, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Gunawan et al., 2020). Sayangnya, hingga kini belum terdapat konsep penataan kawasan yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran UMKM di Pantai Biru. Kawasan ini memiliki potensi yang besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan aksesibilitas, belum adanya zonasi ruang yang jelas, serta kurangnya intervensi kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna merumuskan strategi penataan kawasan wisata pesisir yang mampu mengakomodasi kebutuhan ruang dan aktivitas UMKM, serta mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritik terhadap pengembangan wisata berbasis tata ruang, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk peningkatan kualitas kawasan pesisir. Dengan mengintegrasikan pendekatan partisipatif dan perencanaan spasial, kawasan Pantai Biru diharapkan dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan (Gössling & Hall, 2019; Kim et al., 2023). Kajian ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konteks urban coastal resilience, di mana pengembangan ekonomi harus berjalan beriringan dengan konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Nayak et al., 2020; Rangel-Buitrago & Anfuso, 2021).

2. METODE

2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di kawasan Pantai Biru Kota Makassar yang secara administratif terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Kawasan ini termasuk dalam zona pesisir selatan Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar, dan memiliki karakteristik geografis berupa garis pantai yang landai, dengan potensi keindahan alam yang tinggi seperti hamparan pasir putih, pemandangan laut terbuka, serta vegetasi pantai yang masih alami di beberapa titik. Pantai Biru merupakan bagian dari pengembangan kawasan wisata pesisir yang sebelumnya dikenal sebagai Pantai Tanjung Merdeka, namun seiring waktu mengalami pemisahan pengelolaan secara informal oleh masyarakat lokal dan kelompok-kelompok usaha kecil yang ada di sekitarnya. Keberadaan UMKM di sekitar Pantai Biru cukup signifikan, terutama dalam sektor kuliner, penyewaan wahana laut, dan kerajinan tangan, meskipun masih belum terkoordinasi secara formal dalam struktur penataan kawasan.

Namun, kawasan ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti belum adanya konsep zonasi ruang yang jelas, kurangnya infrastruktur pendukung wisata seperti akses jalan yang memadai, tempat parkir, toilet umum, tempat ibadah, dan fasilitas kebersihan. Selain itu, pengelolaan kawasan masih bersifat parsial, minim koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Padahal, posisi strategis Pantai Biru yang dekat dengan pusat kota dan kawasan pengembangan ekonomi lainnya seperti CPI (Center Point of Indonesia) menjadikannya sebagai wilayah potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata pesisir berbasis masyarakat dan UMKM. Oleh

karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk merumuskan strategi penataan kawasan yang tidak hanya memperhatikan aspek estetika dan lingkungan, tetapi juga memperkuat peran ekonomi lokal melalui penguatan sektor UMKM.

2.2. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi visual terhadap kondisi eksisting Kawasan Pantai Biru Kota Makassar. Wawancara dilakukan terhadap berbagai informan kunci seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengelola wisata lokal, tokoh masyarakat, serta pihak dari pemerintah kecamatan dan kelurahan yang terkait langsung dengan pengelolaan kawasan. Observasi dilakukan untuk mencatat secara langsung kondisi fisik kawasan, seperti tata letak fasilitas wisata, pola aktivitas masyarakat, serta kondisi infrastruktur pendukung. Sementara itu, dokumentasi visual digunakan untuk melengkapi catatan lapangan guna memperkuat temuan secara empirik.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen perencanaan, laporan kebijakan, peta tata ruang wilayah, hingga studi terdahulu yang relevan dengan penataan kawasan pesisir dan pengembangan UMKM. Sumber data ini antara lain berasal dari instansi pemerintah daerah seperti Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, serta dokumen akademik dari berbagai literatur dan jurnal ilmiah yang menunjang kajian teori dalam penelitian ini.

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, digunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Menurut Carter et al. (2014), triangulasi sumber mengacu pada penggunaan berbagai sumber informasi untuk meningkatkan keandalan dan validitas data, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan beberapa teknik pengumpulan data terhadap objek atau fenomena yang sama guna memastikan konsistensi temuan. Strategi triangulasi ini penting untuk mengurangi bias peneliti dan meningkatkan kepercayaan terhadap data (Noble & Heale, 2019).

Dalam praktiknya, triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi hasil wawancara pelaku UMKM dan masyarakat lokal dengan temuan dari observasi langsung di lapangan serta data dokumenter seperti rencana pengembangan kawasan dan data statistik jumlah UMKM. Misalnya, pernyataan dari informan mengenai hambatan pengembangan usaha di kawasan wisata, seperti keterbatasan fasilitas umum, kemudian diuji kebenarannya melalui observasi langsung terhadap kondisi fasilitas yang tersedia di lokasi. Selanjutnya, informasi tersebut diperkuat atau ditelaah ulang melalui dokumen-dokumen perencanaan yang ada. Dengan menggunakan pendekatan triangulasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai kondisi aktual di kawasan wisata Pantai Biru.

2.3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami makna mendalam dari fenomena yang diamati di lapangan. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk mengungkap pola-pola, tema, dan makna yang terkandung di dalamnya. Proses analisis data dimulai dengan tahap data reduction, yaitu memilah dan merangkum data mentah yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih terorganisir. Tahap ini melibatkan penyusunan data menjadi kalimat atau satuan kata bermakna, sehingga lebih mudah ditelusuri dan dikaji ulang. Selanjutnya dilakukan data display, yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi, matriks, atau visualisasi sederhana untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi lapangan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau conclusion drawing/verification, di mana peneliti menginterpretasikan makna dari data yang telah ditampilkan, kemudian memverifikasi kebenaran dan konsistensi temuan dengan cara membandingkan antar sumber data maupun antar metode pengumpulan data.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Nowell et al. (2017), yang menyatakan bahwa analisis tematik dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan proses yang berulang dan reflektif, guna menjamin bahwa kategori yang terbentuk benar-benar mewakili makna dari data yang terkumpul. Selain itu, Braun dan Clarke (2019) menekankan pentingnya keterlibatan aktif peneliti dalam mengidentifikasi tema, yang tidak hanya sekadar muncul dari data, tetapi juga dibentuk melalui interpretasi yang cermat. Oleh karena itu, peneliti dalam studi ini melakukan pembacaan ulang data secara berulang, membuat catatan reflektif, serta mengorganisasi informasi ke dalam tema-tema utama seperti kondisi infrastruktur kawasan, pola usaha pelaku UMKM, serta tantangan yang dihadapi dalam penataan sektor informal. Kegiatan ini diperkuat dengan member checking kepada informan untuk memastikan validitas interpretasi.

Triangulasi metode juga digunakan dalam tahap analisis, yakni dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan telaah dokumen. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan data, sebagaimana disarankan oleh Korstjens dan Moser (2018), bahwa triangulasi menjadi salah satu teknik utama

dalam memastikan trustworthiness dalam riset kualitatif. Keseluruhan proses ini dilakukan secara bertahap dan mendalam untuk menggambarkan secara utuh dinamika penataan kawasan Pantai Biru dalam mendukung pengembangan UMKM.

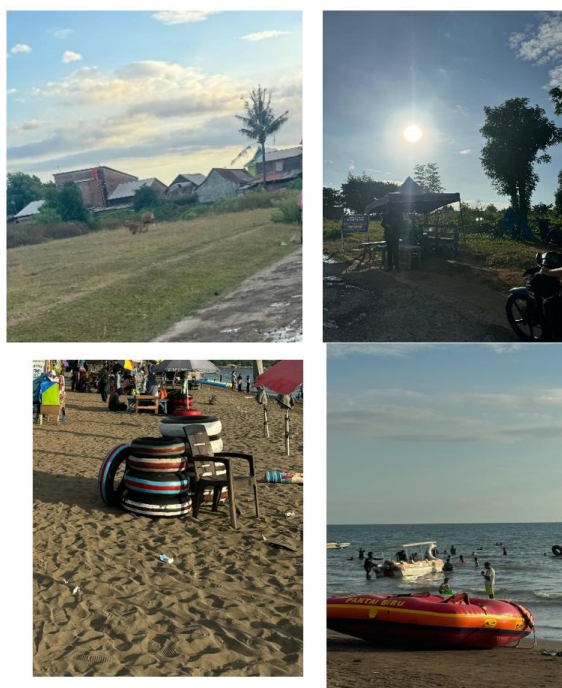
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penataan Lahan di Kawasan Pariwisata Pesisir

Sarana wisata merupakan bagian esensial dalam menunjang keberhasilan suatu kawasan wisata. Sebagaimana dikemukakan oleh Suwanto (2004), kelengkapan sarana merupakan syarat utama dalam melayani kebutuhan wisatawan agar dapat menikmati perjalanan wisatanya. Di Pantai Biru Kota Makassar, kehadiran sarana wisata menjadi faktor penentu dalam menarik minat pengunjung. Sarana seperti banana boat, jet ski, sepeda bebek, dan snorkeling menjadi elemen daya tarik utama. Namun demikian, kualitas dan keberagaman sarana tersebut perlu terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya ekspektasi wisatawan terhadap layanan yang nyaman dan memadai.

Penataan sarana wisata harus mempertimbangkan kebutuhan wisatawan, baik dari segi jumlah (kuantitatif) maupun mutu pelayanan (kualitatif). Berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan bahwa meskipun fasilitas permainan air cukup lengkap, beberapa sarana pendukung seperti kamar bilas, toilet umum, dan area tunggu belum memenuhi standar kenyamanan. Hal ini sejalan dengan pandangan Goeldner & Ritchie (2012) yang menyatakan bahwa pelayanan wisata yang berkualitas merupakan gabungan dari fisik yang memadai dan pelayanan manusia yang profesional. Dengan demikian, perbaikan dan penataan ulang sarana menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepuasan pengunjung.

Dari hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa atraksi permainan air di Pantai Biru merupakan magnet utama yang mampu menarik wisatawan dalam jumlah signifikan. Permainan seperti banana boat dan jet ski menjadi favorit, terutama di akhir pekan dan musim libur. Namun, penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa standar keselamatan dan pemeliharaan fasilitas masih belum maksimal. Menurut Swarbrooke (2015), wisata berbasis aktivitas memerlukan pengelolaan yang profesional agar tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga aman dan memberikan pengalaman berkualitas bagi wisatawan.



Gambar 1. Lahan Kosong dan fasilitas Penunjang. *Sumber: Hasil Observasi 2024.*

Partisipasi pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, dalam pengelolaan sarana wisata juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa pengunjung yang datang karena tertarik pada wahana permainan air secara tidak langsung mendorong peningkatan pendapatan mereka, baik dari usaha kuliner, penyewaan pelampung, hingga jasa transportasi. Hal ini mendukung teori Blakely & Leigh (2013) yang menegaskan bahwa integrasi sektor wisata dan UMKM akan menciptakan efek ganda terhadap pertumbuhan

ekonomi lokal. Namun, masih diperlukan pembinaan dan fasilitasi agar UMKM dapat lebih terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan sarana wisata.

Selain itu, masih terdapat lahan kosong di kawasan Pantai Biru yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan hasil dokumentasi dan pemetaan, lahan-lahan tersebut berpotensi untuk dikembangkan menjadi taman tematik, area olahraga pantai, dan ruang terbuka publik. Inskeep (1991) menyatakan bahwa tata ruang kawasan wisata yang baik harus mampu menciptakan keseimbangan antara area komersial dan ruang publik. Oleh karena itu, penataan lahan kosong tersebut perlu diarahkan untuk mendukung fungsi wisata dan menciptakan kenyamanan jangka panjang bagi pengunjung.

Di sisi lain, kualitas pelayanan menjadi aspek yang paling banyak dikeluhkan oleh wisatawan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dimensi pelayanan seperti keramahan petugas, kecepatan respons terhadap keluhan, dan ketersediaan informasi masih kurang. Dalam model SERVQUAL oleh Parasuraman et al. (1988), kualitas layanan diukur dari lima dimensi utama. Penelitian ini menemukan bahwa dimensi tangible (sarana fisik) sudah cukup baik, namun assurance dan responsiveness masih rendah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM pengelola wisata menjadi sangat penting untuk menciptakan pengalaman wisata yang memuaskan.

Temuan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya pelibatan masyarakat lokal secara formal dalam proses perencanaan dan penataan sarana wisata. Sebagian besar keterlibatan masyarakat masih sebatas operasional di lapangan, seperti menjaga alat permainan atau mengatur parkir. Menurut Chambers (1997), pembangunan berbasis partisipatif akan menciptakan keberlanjutan karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan kawasan tersebut. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka pengelolaan kawasan wisata akan menjadi lebih inklusif dan tangguh.

Dari sisi ekologis, penempatan beberapa fasilitas wisata terlalu dekat dengan garis pantai menimbulkan risiko terhadap lingkungan pesisir, seperti abrasi dan pencemaran laut. Penataan sarana wisata semestinya mempertimbangkan daya dukung ekologis sebagaimana ditegaskan oleh Fennell (2021) dalam teori ekowisata. Kegiatan wisata yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem laut dan mengurangi daya tarik kawasan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan berbasis konservasi sangat diperlukan agar pengembangan wisata tetap selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan.

Dalam konteks kebijakan, penelitian ini menemukan belum adanya rencana induk atau masterplan yang terintegrasi dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Biru. Hal ini menyebabkan pengelolaan sarana dan prasarana menjadi parsial dan tidak terkoordinasi antarinstansi. Menurut Giampiccoli dan Mtapuri (2020), pengembangan wisata yang berkelanjutan memerlukan kebijakan lintas sektor yang terstruktur dan fleksibel. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis untuk kawasan ini.

3.2. Peningkatan Prasarana di Kawasan Pariwisata Pesisir

Pengembangan prasarana di kawasan wisata pesisir merupakan elemen krusial dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata. Prasarana yang memadai tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Penelitian Fadhilah (2022) menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan peluang kerja dan mendukung usaha kecil dan menengah di sekitar destinasi wisata. Di Kawasan Pantai Biru, Kecamatan Tamalate, ketersediaan area parkir, fasilitas sanitasi yang memadai, serta ruang publik yang tertata dengan baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dan mendukung pariwisata berkelanjutan.

Namun demikian, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan dalam penataan lahan dan infrastruktur. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan lahan parkir yang menyebabkan pengunjung memarkir kendaraan di pekarangan rumah warga, serta keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi yang tidak teratur. Situasi ini mengurangi kenyamanan pengunjung dan mengganggu estetika kawasan wisata. Menurut Wang et al. (2025), pengelolaan kapasitas daya dukung pariwisata harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan kapasitas lingkungan, sehingga diperlukan penataan ulang infrastruktur dan zona aktivitas untuk menciptakan kawasan wisata yang tertib dan ramah lingkungan.

Salah satu fasilitas yang cukup mendukung aktivitas wisata di Pantai Biru adalah keberadaan gazebo, yang jumlahnya mencapai sekitar 15 unit dan tersebar di sepanjang garis pantai. Gazebo ini menjadi tempat bersantai bagi pengunjung, sekaligus memberi peluang ekonomi bagi warga setempat melalui penyewaan atau penyediaan layanan makanan dan minuman. Briones-Peñalver et al. (2023) menekankan bahwa pengembangan fasilitas wisata

yang mempertimbangkan pemberdayaan ekonomi lokal dapat memperkuat konsep ekonomi biru dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, keberadaan fasilitas sederhana seperti gazebo dapat memberikan dampak ganda secara ekonomi dan sosial.

Meskipun demikian, fasilitas sanitasi di kawasan ini masih tergolong minim. Hanya terdapat tiga unit toilet yang dikelola oleh warga, dengan sistem berbayar. Hal ini dapat menurunkan kenyamanan wisatawan serta berdampak negatif terhadap citra destinasi. Johannis et al. (2022) menegaskan bahwa penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih dan memadai merupakan komponen utama dalam pengembangan infrastruktur wisata yang mendukung keberlanjutan dan kepuasan pengunjung. Oleh karena itu, penambahan dan perbaikan fasilitas sanitasi menjadi kebutuhan mendesak dalam pengelolaan kawasan Pantai Biru.

Masalah lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah pengelolaan sampah. Di kawasan Pantai Biru, jumlah tempat sampah sangat terbatas dan kesadaran pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah, sehingga menyebabkan akumulasi sampah di area pantai. Randone et al. (2017) menyatakan bahwa peningkatan aktivitas wisata pesisir berisiko menimbulkan degradasi lingkungan jika tidak dibarengi dengan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk peningkatan fasilitas, edukasi kepada pengunjung, serta peran aktif masyarakat.

Dari aspek spiritualitas, fasilitas ibadah seperti musholla juga berperan penting dalam mendukung wisata ramah Muslim. Di Kawasan Pantai Biru, tersedia satu unit musholla yang digunakan oleh wisatawan untuk menunaikan ibadah. Penelitian Hailuddin et al. (2022) menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas ibadah yang layak di kawasan wisata dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan Muslim dan memperluas segmen pasar pariwisata. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas dan kenyamanan musholla menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan destinasi yang inklusif.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, UMKM memainkan peran signifikan di kawasan wisata ini. Namun, UMKM yang beroperasi tanpa pengaturan zonasi yang jelas justru mengganggu ketertiban dan kenyamanan kawasan wisata. Fadhilah (2022) menekankan bahwa integrasi UMKM ke dalam perencanaan kawasan wisata sangat penting untuk menciptakan hubungan sinergis antara pelaku usaha lokal dan pengelola kawasan. Pendekatan ini akan menciptakan kawasan wisata yang tertata dan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, strategi pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Menurut Briones-Peñalver et al. (2023), pendekatan pengembangan infrastruktur wisata yang berkelanjutan perlu melibatkan partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta perencanaan spasial yang terintegrasi. Implementasi strategi ini di Kawasan Pantai Biru akan menciptakan destinasi wisata yang lebih kompetitif dan ramah lingkungan dalam jangka panjang.

Akhirnya, peran pemerintah sangat strategis dalam mendukung pengembangan kawasan wisata Pantai Biru. Pemerintah diharapkan hadir dalam bentuk regulasi, pembiayaan, serta fasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Wang et al. (2025) menggarisbawahi pentingnya keterlibatan pemerintah dalam merancang kebijakan pengembangan kawasan wisata yang memperhatikan keberlanjutan dan partisipasi multi-pihak. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan memperkuat Kawasan Pantai Biru sebagai destinasi wisata pesisir unggulan yang berkelanjutan.

3.3. Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Pariwisata Pesisir

Pantai Biru, yang terletak sekitar 15 menit dari pusat Kota Makassar atau kawasan Pantai Losari, memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata. Namun, hasil survei lapangan menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan ini masih memerlukan perbaikan, dengan sebagian besar jalan dari pintu gerbang masuk mengalami kerusakan dan sempit, sehingga menyulitkan wisatawan dan pelaku UMKM dalam mengakses kawasan tersebut.

Studi oleh Jangra et al. (2023) menegaskan bahwa transportasi merupakan faktor penting dalam pengembangan sektor pariwisata, dengan kondisi jalan yang buruk menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan pariwisata di daerah tertentu. Mereka menyatakan bahwa "the bad condition of National Highway–22 is one of the barriers to tourism development in Kinnaur". Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Lebih lanjut, Liu et al. (2022) dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa mobilitas wisatawan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata, dengan peningkatan mobilitas wisatawan menjadi cara penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata. Hal ini menekankan pentingnya infrastruktur transportasi yang baik dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Investasi dalam infrastruktur pariwisata, termasuk transportasi, juga memiliki dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata secara keseluruhan. Corboş et al. (2024) dalam tinjauan literatur mereka menyoroti bahwa investasi dalam infrastruktur pariwisata, seperti transportasi, akomodasi, dan fasilitas rekreasi, sangat penting untuk menarik dan mempertahankan wisatawan, serta memengaruhi pengalaman wisatawan dan pembangunan ekonomi lokal.



Gambar 2. Kondisi Jalur Kasesibilitas Kawasan Wisata Pesisir Pantai Biru. *Sumber: Hasil Observasi 2024.*

Dalam konteks Pantai Biru, peningkatan aksesibilitas melalui perbaikan infrastruktur jalan tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan dan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga akan memberikan dampak positif terhadap UMKM lokal. Dengan akses yang lebih mudah, UMKM seperti warung makan, penginapan, dan penyedia jasa wisata akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan kawasan wisata tersebut.

3.4. Strategi Penataan Kawasan Wisata Pesisir dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Wisata Pantai Biru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

Berdasarkan hasil analisis data spasial dan observasi lapangan di Kawasan Wisata Pantai Biru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi untuk mendukung pengembangan UMKM lokal. Permasalahan tersebut meliputi kondisi infrastruktur yang kurang memadai, fasilitas umum yang terbatas, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta aksesibilitas yang perlu ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan strategi penataan kawasan wisata pesisir yang komprehensif dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan UMKM dan meningkatkan daya tarik wisata kawasan tersebut.

a. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum di kawasan wisata Pantai Biru sangat penting untuk mendukung aktivitas UMKM dan kenyamanan wisatawan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Perbaikan dan pelebaran jalan menuju kawasan wisata untuk meningkatkan aksesibilitas bagi wisatawan dan pelaku UMKM.
- 2) Pembangunan lahan parkir yang memadai dan terorganisir untuk mengatasi masalah parkir yang selama ini mengandalkan pekarangan rumah warga.
- 3) Penyediaan fasilitas umum seperti toilet yang bersih dan layak, serta mushollah yang nyaman bagi pengunjung.
- 4) Penambahan dan pemeliharaan gazebo sebagai tempat istirahat dan berjualan bagi pelaku UMKM.

Menurut Suwanto (2004), sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Penataan sarana kawasan wisata Pantai Biru harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

b. Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan

Pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk menjaga kebersihan dan estetika kawasan wisata. Strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- 1) Penyediaan tempat sampah yang memadai di berbagai titik strategis kawasan wisata.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku UMKM tentang pentingnya menjaga kebersihan melalui sosialisasi dan edukasi.
- 3) Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ilham Junaid dkk. (2021), pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tugas utama dalam mendukung program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk dalam pengelolaan lingkungan kawasan wisata.

c. Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Produk Lokal

Pemberdayaan UMKM lokal merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya tarik wisata kawasan Pantai Biru. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

- 1) Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam pengembangan produk, manajemen usaha, dan pemasaran.
- 2) Penyediaan ruang usaha yang terorganisir dan strategis bagi pelaku UMKM di kawasan wisata.
- 3) Pengembangan produk lokal yang khas dan berkualitas untuk menarik minat wisatawan.

Menurut penelitian oleh Bahrul Ulum Ilham dkk. (2023), pengembangan UMKM berbasis zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) di Kawasan Wisata Lego-Lego Makassar telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas produk UMKM dan pendapatan pelaku usaha.

d. Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata. Strategi yang dapat diterapkan meliputi:

- 1) Pembentukan kelompok kerja atau koperasi yang melibatkan pelaku UMKM, masyarakat, dan pemerintah dalam pengelolaan kawasan wisata.
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan pendampingan.
- 3) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengembangan kawasan wisata.

Sebagaimana dikemukakan oleh Akbar B. Mappagala (2017), penataan ruang kawasan pesisir yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan potensi wisata dan perekonomian daerah.

e. Promosi dan Pemasaran Kawasan Wisata

Promosi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan Pantai Biru. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Pengembangan strategi pemasaran yang terintegrasi, termasuk melalui media sosial dan platform digital.
- 2) Penyelenggaraan event atau festival yang menampilkan budaya lokal dan produk UMKM.
- 3) Kerjasama dengan agen perjalanan dan media untuk mempromosikan kawasan wisata Pantai Biru.

Menurut penelitian oleh Hasriani dan Muslimin (2024), pengembangan wisata halal di daerah pesisir dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui promosi yang tepat sasaran.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pengembangan kawasan wisata Pantai Biru di Makassar menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui integrasi sektor pariwisata dan UMKM. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur, fasilitas umum yang belum memadai, serta pengelolaan lingkungan yang kurang optimal. Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata masih terbatas, yang berdampak pada kurangnya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan kawasan tersebut. Selain itu, belum adanya rencana induk atau masterplan yang terintegrasi menyebabkan pengelolaan sarana dan prasarana menjadi tidak terkoordinasi antarinstansi.

Untuk mengoptimalkan potensi kawasan Pantai Biru, diperlukan strategi penataan yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum, pengelolaan sampah yang efektif, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, serta

penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata. Selain itu, promosi yang efektif melalui media sosial dan penyelenggaraan event lokal dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, kawasan Pantai Biru dapat berkembang menjadi destinasi wisata pesisir yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat sekitar.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aflaha, R., Handayani, P. W., & Damayanti, R. (2020). Coastal tourism planning to support the creative economy in Indonesia. *International Journal of Tourism Cities*, 6(3), 559–574.
- Barragán, J. M., & de Andrés, M. (2019). Analysis and trends of the world's coastal cities and agglomerations. *Ocean & Coastal Management*, 171, 22–32.
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2013). *Planning local economic development: Theory and practice* (5th ed.). SAGE Publications.
- Briones-Peñalver, A. J., Bernal-Conesa, J. A., & de Nieves-Nieto, C. (2023). Sustainable development in coastal tourism: Strategies for infrastructure and community participation. *Sustainability*, 15(2), 712.
- Briones-Peñalver, A.-J., Prokopchuk, L., & Samoiluk, I. (2023). Strategic vectors of coastal tourism development as a blue economy component in the international dimension. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 14(6), 2473–2496.
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Corboş, R.-A., Bunea, O.-I., & Moncea, M. I. (2024). A literature review on tourism infrastructure investments and their impact on tourism development. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 18(1), 268–278.
- Fadhilah, I. N. (2022). The role of tourism infrastructure development in empowering local MSMEs: A case study in coastal areas of Southeast Asia. *Journal of Tourism and Hospitality Management*, 10(4), 65–78.
- Fennell, D. A. (2021). *Ecotourism* (5th ed.). Routledge.
- Giampiccoli, A., & Mtapuri, O. (2020). Community-based tourism: Critical success factors. *International Journal of Tourism Cities*, 6(1), 125–139.
- Goeldner, C. R., & Ritchie, J. R. B. (2012). *Tourism: Principles, practices, philosophies* (12th ed.). Wiley.
- Gössling, S., & Hall, C. M. (2019). Sustainable tourism: A global perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 889–903.
- Gunawan, H., Purnaweni, H., & Suharyo, O. S. (2020). Community empowerment strategy through coastal tourism: A case in Central Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 584(1), 012027.
- Hailuddin, H., Abdulkarim, A., & Ismail, H. N. (2022). Muslim-friendly tourism facilities in coastal destinations: Enhancing spiritual comfort and inclusivity. *International Journal of Tourism Cities*, 8(1), 45–58.
- Herrera-Franco, G., Suárez-Castillo, A. N., & Gallo, P. J. (2022). Integrating spatial planning and local economic development: A framework for resilient coastal communities. *Land Use Policy*, 112, 105812.
- Ilham, B. U., Dirwan, D., & Randa, A. (2023). Pengembangan UMKM terpadu berbasis zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) di kawasan wisata Lego-Lego Makassar. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 315–335.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism planning: An integrated and sustainable development approach*. Van Nostrand Reinhold.
- Jangra, R., Kaushik, S. P., Singh, E., Kumar, P., & Jangra, P. (2023). The role of transportation in developing the tourism sector at high altitude destination, Kinnaur. *Environment, Development and Sustainability*.
- Jangra, S., Sharma, A., & Sharma, R. (2023). The role of transportation in tourism development: A case study of Kinnaur district. *Journal of Tourism and Hospitality*, 12(3), 45–58.

- Johannis, A., Eryani, R., & Wijaya, M. (2022). Sustainable sanitation facilities and tourist satisfaction in beach destinations: A structural equation model approach. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 27(6), 569–585.
- Junaid, I. (2021). Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pariwisata berbasis UMKM. Politeknik Pariwisata Makassar.
- Kim, M. J., Lee, C. K., & Jung, T. (2023). Smart tourism city development for sustainable urban tourism: Lessons from Asian coastal cities. *Tourism Management Perspectives*, 46, 101070.
- Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. *European Journal of General Practice*, 24(1), 120–124.
- Liu, Y., Wang, S., & Li, J. (2022). The contribution of tourism mobility to tourism economic growth in China. *PLOS ONE*, 17(10), e0275605.
- Mappagala, A. B. (2017). Penataan ruang kawasan tepi pantai Mattirotasi dalam menunjang kepariwisataan di Kota Parepare (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nayak, S., Dash, S., & Mishra, B. B. (2020). Sustainable development and resilience of coastal tourism in the face of climate change: Insights from India. *Sustainability*, 12(5), 1765.
- Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *Evidence-Based Nursing*, 22(3), 67–68.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Popescu, R. I., & Corboş, R. A. (2017). The role of transport infrastructure in tourism development: Case study of Romania. *Procedia Engineering*, 181, 1045–1051.
- Randone, M., Fernandes, L., Halpern, B. S., et al. (2017). Coastal tourism and environmental degradation: The need for spatial planning and sustainable governance. *Marine Policy*, 87, 1–6.
- Rangel-Buitrago, N., & Anfuso, G. (2021). Coastal scenic assessment and tourism carrying capacity in rapidly urbanizing coastal areas. *Sustainable Cities and Society*, 68, 102782.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar pariwisata* (Ed. 2). Andi.
- Swarbrooke, J. (2015). *Sustainable tourism management*. CABI Publishing.
- Trisnawati, I., Satria, A., & Nurani, T. W. (2021). Coastal tourism development and local community participation in Indonesia: A policy analysis. *Ocean & Coastal Management*, 199, 105402.
- UNWTO. (2022). *Tourism and Sustainable Development Goals – Progress Report*. United Nations World Tourism Organization.
- Wang, H., et al. (2025). Towards management of sustainable tourism development in coastal destinations of the Bohai Rim: Insights from a tourism carrying capacity analysis. *Discover Sustainability*, 6(168).
- Wang, Y., Zhang, L., & Li, Q. (2025). Managing tourism carrying capacity in coastal destinations: A framework for sustainable infrastructure planning. *Journal of Sustainable Tourism*, 33(1), 25–44.